

**PENGARUH ALOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN DAN ANGGARAN
KESEHATAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI
KABUPATEN DAN KOTA PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI



Nama : Tania Adetia Taresa

NIM : 222018332

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

2023

SKRIPSI
**PENGARUH ALOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN DAN ANGGARAN
KESEHATAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI
KABUPATEN DAN KOTA PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



Nama : Tania Adetia Taresa

NIM : 222018332

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

2023

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tania Adetia Taresa
NIM : 222018332
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : Pengaruh Alokasi Anggaran Pendidikan dan Anggaran Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Selatan

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata 1 baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Februari 2023


Tania Adetia Taresa

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Alokasi Anggaran Pendidikan dan Anggaran Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Selatan
Nama : Tania Adetia Taresa
Nim : 222018332
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Mata Kuliah Pokok : Perencanaan dan Penganggaran Sektor Publik

Diterima dan disahkan
Pada tanggal, Februari 2023

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Drs. Sunardi, S.E., M.Si., CGRM
NIDN : 02060430



Welly, S.E., M.Si.
NIDN : 0212128102

Mengetahui
Dekan
U.b Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Petri Saifuddin, S.E., AK.M., Si.CA
NIDN : 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya tiada berputus dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kafur”

(Qs, Yusuf : 87)

“Tidak ada kesuksesan melainkan dengan pertolongan Allah ”

- Tania Adetia Taresa -

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta
bapak Junaidi dan Ibu Tina**
- ❖ Adikku**
- ❖ Keluarga besarku**
- ❖ Almamaterku**



PRAKATA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin, tiada kata yang dapat penulis sampaikan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan ridho-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Alokasi Anggaran Pendidikan dan Anggaran Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Selatan”**. Skripsi ini disusun sebagai syarat menyelesaikan jenjang strata 1 (guna) meraih gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Ucapan terimakasih penulis juga sampaikan terutama orangtua Ayahanda saya **Bapak Junaidi** dan **Ibunda saya Ibu Tina** serta keluarga yang telah mendo'akan dan memberi semangat dalam proses ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Drs. Sunardi, S.E., M.Si., CGRM dan ibu Welly, S.E., M.Si yang telah membimbing dan memberi masukan guna menyelesaikan skripsi ini, tetapi penulis yakin tanpa adanya saran, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka skripsi ini tidak mungkin dapat tersusun sebagaimana mestinya.

Selain itu ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Yudha Mahrom DS, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak Dr. Betri, S.E., M.Si., AK., CA dan Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff pengajar Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kota Palembang yang telah memberikan izin penelitian sehingga selesainya penelitian skripsi ini.
6. Sahabat-sahabatku yang telah kebersamai dan memberikan motivasi dalam segala hal
7. Teman-teman angkatan 2018 yang telah bekerjasama menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Semoga Allah SWT membalas setiap bantuan yang diberikan guna menyelesaikan tulisan ini. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritikan dari pembaca. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, Februari 2023



Tania Adetia Taresa

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRKATA.....	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Pustaka	11
1.Landasan Teori	11
2.Peneltian Sebelumnya.....	38
B. Kerangka Pemikiran	42
C. Hipotesis	44

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian	47
C. Operasionalisasi Variabel	47
D. Populasi dan Sampel.....	48
E. Data yang digunakan.....	48
F. Metode Pengumpulan Data	49
G. Analisis Data dan Teknik Analisis	50

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	58
B. Pembahasan dan Hasil	72

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan.....	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN.....

DAFTAR TABEL

	Halaman
Table I.1 Ikhtisar Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Kesehatan Serta IPM	7
Table II.1 Batas Maksimum dan Minimum Standar IPM.....	37
Table II.2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya	41
Table III.1 Operasionalisasi Variabel	47
Tabel IV.1 Alokasi Anggaran Belanja Pendidikan dan Kesehatan serta Indeks Pembangunan Manusia	61
Tabel IV.2 Hasil Statistik Deskriptif.....	63
Tabel IV.3 One Sample Kolmogrov Smirnov	64
Tabel IV.4 Hasil Uji Multikoleniaritas	66
Tabel IV.5 Hasil Uji Autokorelasi	67
Tabel IV.6 Hasil Uji Regresi Berganda	69
Tabel IV.7 Hasil Uji Secara Bersama	70
Tabel IV.8 Hasil Uji Secara Parsial (Uji t)	71
Tabel IV.9 Hasil Uji Koefesien Determinasi (R ²).....	72

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Kerangka Pemikiran	44
Gambar IV.1 Hasil Output SPSS Uji Normalitas (normal P-P plot)	66
Gambar IV.2 Scatterplot	69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Jadwal Penelitian

Lampiran 2 : Data Tabulasi

Lampiran 3 : Statistik Deskriptif

Lampiran 4: Hasil Uji F, Uji t, dan Uji R, Koefisien Determinasi

Lampiran 5 : Tabel F

Lampiran 6 : Tabel t

Lampiran 5 : Surat keterangan telah melakukan riset

Lampiran 6 : Bukti pelunasan BPP

Lampiran 7 : Kartu Aktivitas Bimbingan

Lampiran 8 : Sertifikat Komputer

Lampiran 9 : Sertifikat AIK

Lampiran 9 : Plagiat Cheker

Lampiran 10 : Sertifikat SPSS

Lampiran 11 : Biodata Penulis

ABSTRAK

Tania Adetia Taresa/222018332/2023/ Pengaruh Alokasi Anggaran Pendidikan dan Anggaran Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Selatan

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh alokasi anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Selatan secara simultan dan parsial. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif. Data yang digunakan yaitu data sekunder. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan metode observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif, menggunakan uji asumsi klasik, regresi linear berganda, uji hipotesis uji F dan t serta koefisien determinasi. 1). Hasil nilai signifikan F menunjukkan nilai 0,005 lebih kecil dari 0,05, menunjukkan ada pengaruh alokasi anggaran pendidikan dan anggaran alokasi kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Selatan, 2). Hasil uji t nilai untuk anggaran pendidikan sebesar $0,195 > 0,05$, artinya Tidak ada pengaruh Alokasi Anggaran Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Selatan dan 3). Hasil uji nilai untuk Anggaran Kesehatan sebesar $0,500 > 0,05$, artinya Tidak ada pengaruh Alokasi Anggaran Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Selatan. Hasil koefisien determinasi R^2 alokasi anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia sebesar 0,167 atau 16,7%.

Kata Kunci: Alokasi Anggaran Pendidikan dan Anggaran Alokasi Kesehatan dan Indeks Pembangunan Manusia.

ABSTRACT

Tania Adetia Taresa/222018332/2023/ The Effect of Education Budget Allocation and Health Budget on Human Development Index in Districts and Cities of South Sumatra Province.

The formulation of the problem in this study is how to influence the allocation of the education budget and health budget on the human development index in the Regencies and Cities of South Sumatra Province simultaneously and partially. The type of research used is associative research. The data used is secondary data. The population in this study were 17 districts/cities in South Sumatra Province. Data collection technique is by using the method of observation and documentation. The data analysis method used in this study is quantitative analysis, using the classical assumption test, multiple linear regression, hypothesis testing F and t tests and the coefficient of determination. 1). The results of a significant F value show a value of 0.005 which is less than 0.05, indicating that there is an influence of the education budget allocation and health allocation budget on the human development index in the Regencies and Cities of South Sumatra Province, 2). The results of the t-test value for the education budget are $0.195 > 0.05$, meaning that there is no effect of the Education Budget Allocation on the Human Development Index in Districts and Cities of South Sumatra Province and 3). The result of the value test for the Health Budget is $0.500 > 0.05$, meaning that there is no effect of the Health Budget Allocation on the Human Development Index in Districts and Cities of South Sumatra Province. The results of the coefficient of determination R² of education budget allocation and health budget on the human development index are 0.167 or 16.7%.

Keywords: Education Budget Allocation and Health Budget Allocation and Index Human Development.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen utama kebijakan dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus berupaya secara nyata dan terstruktur untuk menghasilkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang betul-betul mencerminkan kebutuhan riil masyarakat di daerah sesuai dengan potensi masing-masing. Untuk melihat apakah daerah telah siap secara finansial untuk menyongsong otonomi daerah, antara lain adalah dengan melihat apakah sumber-sumber penerimaan APBD nya mampu menutup anggaran belanja daerah yang bersangkutan. Di samping itu anggaran belanja pembangunan yang dialokasikan pada program proyek yang langsung menyentuh sektor ekonomi produktif masyarakat akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Menurut Mangkoesoebroto (2016:53), pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Anggaran yang dialokasikan untuk suatu bidang menunjukkan komitmen pemerintah terhadap permasalahan pada bidang tersebut. Sebagai bentuk kebijakan fiskal pemerintah, setiap tahun pemerintah pusat menetapkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU-APBN) sebagai hak dan komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Sementara pemerintah daerah setiap tahun menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kebijakan

pembangunan masing-masing daerah.

Pada tahun 1990 gagasan pengukuran pembangunan manusia dikembangkan oleh UNDP dalam bentuk *Human Development Index* (HDI)/Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM memberikan suatu ukuran gabungan tiga dimensi tentang pembangunan manusia yang meliputi kesehatan (diukur dari angka harapan hidup sejak waktu lahir/*life expectancy at birth*), pendidikan (diukur dari angka melek huruf penduduk dewasa/*adult literacy rate* dan rata-rata lama sekolah penduduk dewasa/*mean years schooling*) serta standar hidup layak (diukur dari kemampuan daya beli/*purchasing power parity*). Indeks pembangunan manusia kemudian menjadi salah satu indikator yang penting dalam melihat sisi lain dari pembangunan. Manfaat pentingnya IPM antara lain adalah IPM merupakan indikator penting dalam mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) serta IPM dapat menentukan peringkat atau tingkat pembangunan suatu wilayah/negara (BPS, 2015).

IPM merupakan indikator yang di gunakan untuk mengukur salah satu aspek penting yang berkaitan dengan kualitas dari hasil pembangunan ekonomi, yakni derajat perkembangan manusia. IPM mempunyai tiga unsur yaitu kesehatan, pendidikan yang dicapai, dan standar kehidupan atau sering disebut ekonomi. Jadi ketiga unsur ini sangat penting dalam menentukan tingkat kemampuan suatu provinsi untuk meningkatkan IPMnya. Ketiga unsur tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling memengaruhi satu sama yang lainnya.

Terdapat juga penelitian dengan hasil temuan dimana anggaran pendidikan ternyata berpengaruh negatif terhadap pembentukan IPM. Winarti (2014) menenggarai bahwa pengaruh negatif anggaran pendidikan terhadap IPM disebabkan oleh alokasi anggaran pendidikan yang tidak dialokasikan semuanya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, namun juga dialokasikan untuk lainnya seperti gaji pegawai dan biaya pendidikan lainnya. Dengan adanya belanja pendidikan yang tidak efektif, tekanan pada APBN maupun APBD semakin berat.

Menurut Didit Herlianto (2015:19) anggaran merupakan rencana dari seluruh kegiatan perusahaan dalam jangka pendek yang dinyatakan dalam unit kuantitatif. Anggaran harus bersifat formal, artinya anggaran disusun secara sengaja dan bersungguh-sungguh dalam bentuk tertulis. Anggaran harus bersifat sistematis, artinya anggaran disusun dengan berurutan berdasarkan logika. Anggaran belanja publik baik anggaran negara maupun anggaran daerah sudah banyak memiliki belanja yang memiliki karakteristik belanja mengikat. Belanja mengikat ini adalah belanja yang bersifat mandatory spending, yang wajib dialokasikan pemerintah seperti belanja pegawai, belanja operasional, pembayaran utang dan bunga serta dana transfer ke daerah. Hajibabaei dan Ahmadi (2104) menyatakan bahwa pada saat bagian belanja pemerintah dari PDB masih berjumlah lebih kecil dari aturan yang berlaku, maka IPM akan terus meningkat seiring dengan peningkatan belanja pemerintah. namun apabila bagian belanja pemerintah dari PDB sudah lebih besar daripada aturan, maka IPM akan mengalami penurunan.

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi :

Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1). Anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat merupakan alokasi anggaran pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian Negara/lembaga. Kementerian Negara/lembaga yang mendapat alokasi anggaran pendidikan bukan hanya kementerian pendidikan dan kebudayaan serta kementerian agama tetapi juga kementerian/lembaga lain yang menyelenggarakan fungsi pendidikan. Anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah merupakan alokasi anggaran pendidikan yang disalurkan melalui transfer ke daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Sebagaimana berdasarkan PP 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota pendidikan merupakan salah satu urusan wajib daerah..

UU No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan yang mengatur perolehan anggaran untuk sektor kesehatan yaitu dalam Pasal 171 ayat 1 dan 2, dimana Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan). UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan

sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang berhak atas kesehatan.

Menurut Astri (2013) menyatakan dalam hal peningkatan pembangunan manusia, pendidikan dan kesehatan masyarakat yang baik dapat terpenuhi melalui alokasi belanja pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan. Dengan meningkatnya alokasi belanja pemerintah di sektor tersebut maka dapat meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga bisa meningkatkan pembangunan manusia.

Anggaran pendidikan maupun anggaran kesehatan merupakan salah satu komponen penting bagi berjalannya pembangunan manusia di sebuah daerah, dikarenakan adanya jaminan terhadap kualitas sumber daya manusia yang ada serta adanya kemampuan untuk menjaga sumber daya manusia yang dimiliki. Dengan terjaminnya kedua hal tersebut maka akan diharapkan akan meningkatkan indeks pembangunan manusia yang dimiliki dan nantinya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi (Lengkong,2019).

Hal ini perlu mendapat perhatian khusus karena dalam konstitusi (UUD) tidak menyebut nominal persentase untuk anggaran kesehatan, sehingga jika masuk dalam pembahasan MK, posisi UU Kesehatan menjadi sulit karena sejajar dengan UU APBN. Berdasarkan penelitian sebelumnya tentang kajian kepatuhan pemerintahan daerah atas peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah di Aceh yang dilakukan oleh Astri, Dewi Ernital dan Lengkong menyimpulkan bahwa alokasi minimal bidang pendidikan dan

kesehatan dipenuhi tetapi tidak selalu sesuai dengan kebutuhan SKPK terkait atau pemda terkait, melainkan semata-mata hanya untuk memenuhi kewajiban dalam penganggaran daerah saja.

Penelitian sebelumnya oleh Dewi Ernital (2022) membuktikan bahwa Belanja Pendidikan secara parsial tidak ber-pengaruh signifikan terhadap Indeks Pem-bangunan Manusia, Belanja Kesehatan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kerinci tahun 2013-2020.

Penelitian sebelumnya oleh Lengkong (2019) membuktikan bahwa alokasi anggaran dari pemerintah kota Bitung, baik untuk anggaran pendidikan maupun anggaran kesehatan mempunyai korelasi atau hubungan yang positif dengan pembangunan manusia yang ada di Kota Bitung, bahkan tingkat perubahan yang terjadi pada indeks pembangunan manusia Kota Bitung sebagian besar mampu dijelaskan oleh anggaran pendidikan maupun anggaran kesehatan.

Penelitian sebelumnya oleh Mongan (2019) membuktikan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran belanja pemerintah pusat dalam pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Pengeluaran pemerintah pusat dalam sektor kesehatan dan pengeluaran pemerintah daerah dalam pendidikan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, sementara pengeluaran pemerintah daerah di sektor kesehatan memiliki efek negatif dan signifikan.

Tabel I.1 dibawah ini memberikan informasi tentang Indeks Pembangunan Manusia pada Dinas Pendidikan dan Kesehatan di Pemerintah Kabupaten dan

Kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2019 hingga 2021.

Tabel I.1
Ikhtisar Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Kesehatan Serta IPM
Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan 2019-2021

No	Nama Kabupaten/Kota	Tahun	Anggaran Pendidikan	Anggaran Kesehatan	IPM
1	Kab. Muratara	2019	15.01	9.76	64.32
		2020	16.08	9.12	64.49
		2021	15.98	9.87	64.93
2	Kab. PALI	2019	15.19	8.56	64.33
		2020	16.28	8.78	64.7
		2021	16.02	8.87	64.88
3	Kab. Banyuasin	2019	21.22	13.03	66.9
		2020	23.09	13.88	66.74
		2021	22.95	14.03	67.13
4	Kab. Empat Lawang	2019	10.29	6.89	65.1
		2020	14.28	8.78	65.25
		2021	16.59	8.9	65.39
5	Kab Lahat	2019	15.19	9.74	67.62
		2020	17.28	10.11	67.44
		2021	19.02	10.15	67.58
6	Kab Muara Enim	2019	17.77	8.89	68.88
		2020	18.25	9.12	68.74
		2021	19.15	9.58	68.86
7	Kab. Musi banyuasin	2019	23.42	15.18	67.83
		2020	22.89	15.11	67.69
		2021	23.01	15.45	68.1
8	Kab Musi Rawas	2019	14.68	9.02	66.92
		2020	16.78	9.08	66.79
		2021	17.92	10.01	67.01
9	Kab Ogan Ilir	2019	21.1	10.05	67.22
		2020	20.75	10.07	67.06
		2021	21.01	10.23	67.17
10	Kab Ogan Komering Ilir	2019	21.53	11.1	66.96
		2020	20.9	10.9	66.82
		2021	19.9	11.95	67.17
11	Kab Ogan Komering Ulu	2019	18.24	9.78	69.45
		2020	19.22	9.75	69.32
		2021	19.16	9.8	69.6
		2019	19.15	10.17	65.43

No	Nama Kabupaten/Kota	Tahun	Anggaran Pendidikan	Anggaran Kesehatan	IPM
12	Kab Ogan Komering Ulu Selatan	2020	19.45	9.95	65.3
		2021	19.66	10.25	65.34
13	Kab Ogan Komering Ulu Timur	2019	21.11	11.1	69.34
		2020	22.01	10.15	69.28
		2021	21.96	11.18	69.58
14	Kota Lubuk Linggau	2019	15.78	9.86	74.81
		2020	16.89	10.1	74.78
		2021	18.04	10.16	74.89
15	Kota Pagaralam	2019	13.78	7.85	68.44
		2020	15.28	8.77	68.31
		2021	16.19	9.16	68.68
16	Kota Palembang	2019	23.45	14.68	78.44
		2020	25.28	15.57	78.33
		2021	23.67	15.22	78.72
17	Kota Prabumulih	2019	21.32	10.35	74.4
		2020	20.78	10.46	74.55
		2021	21.89	10.51	74.67
	Rata rata		18.938	10.608	68.660

Sumber : Diolah dari data BPKRI dan BPS Sumatera Selatan, 2022.

Tabel I.1 menggambarkan adanya fenomena yang menunjukkan terjadinya fluktuasi anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan yang ikut mempengaruhi indeks pembangunan manusia di beberapa Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan. Berdasarkan data diatas ditemukan terjadinya penurunan indeks pembangunan manusia tetapi untuk anggaran pendidikan dan kesehatannya diatas rata-rata di beberapa Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan. Misalnya Kabupaten Banyuasin pada tahun 2020 anggaran pendidikan dan kesehatannya diatas rata-rata akan tetapi pada indeks pembangunan manusia mengalami penurunan. Hal ini terjadi juga di beberapa kabupaten dan kota lainnya seperti Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul **Pengaruh Alokasi Anggaran Pendidikan dan Anggaran Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Selatan.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah :

- a. Bagaimana Pengaruh Alokasi Anggaran Pendidikan dan Anggaran Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Selatan secara simultan?
- b. Bagaimana Pengaruh Alokasi Anggaran Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Selatan?
- c. Bagaimana Pengaruh Alokasi Anggaran Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui Pengaruh Alokasi Anggaran Pendidikan dan Anggaran Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Alokasi Anggaran Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Selatan.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Alokasi Anggaran Kesehatan Terhadap Indeks

Pembangunan Manusia di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan dan pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik yaitu mengenai pengaruh kepatuhan Pemerintahan Daerah terhadap alokasi anggaran pendidikan dan kesehatandan hubungannya dengan indeks pembangunan manusia.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Selatan

Bagi Pemerintah diharapkan penelitian ini akan bermanfaat dalam mengambil setiap kebijakan dalam pengelolaan keuangan untuk dapat meningkatkan kompetensi kepatuhan alokasi anggaran sektor pendidikan dan kesehatan dalam hubungannya dengan indeks pembangunan manusia

3. Bagi Almamater

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi mahasiswa dan dosen ataupun penelitian lebih lanjut di fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

Daftar Pustaka

- Asiati, dkk (2019) *Metedologi Penelitian Bisnis*. Palembang :NoerFikri Offset.
- Ernita, D. (2022). Pengaruh Alokasi Anggaran Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kerinci. *Jurnal Akrab Juara*, 7(2), 258-270.
- Ghozali Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBMSPPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Lengkong, S. M. K., Rotinsulu, D. C., & Walewangko, E. N. (2019). Pengaruh Alokasi Anggaran Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 18(5).
- Mangkoesebroto (2016:53), *pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah*.
- Mangkoesebroto, Guritno, 2016. *Ekonomi Publik*. Edisi 3. BPFE, Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2012). Perpajakan. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Moleong, L. J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mongan, J. J. S. (2019). Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 4(2), 163-176.
- Muliza, M., Zulham, T., & Seftarita, C. (2017). Analisis pengaruh belanja pendidikan, belanja kesehatan, tingkat kemiskinan dan PDRB terhadap IPM di provinsi Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec*, 3(1), 51-69.
- Pake, S. D. S., Kawung, G. M., & Luntungan, A. Y. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(4).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- PLOUNA IFTITA, N. E. Z. A. (2020). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Upah Minimum Kabupaten/Kota, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks*

Pembangunan Manusia Di Provinsi Sumatera Selatan (Doctoral dissertation, UIN Raden Fatah Palembang).

PP Nomor 55 Tahun 2005

Priyastama, Romie. (2017). *Buku Sakti Kuasi SPSS Pengolah Data & Analisis Data*. Bantul: START UP

Ryantomo, A. (2019). *Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata Dalam Pemberian Izin Pariwisata (Studi Kasus Izin Tempat Rekreasi The Lost World Castle di Kabupaten Sleman)*.

Silaen, S. (2018). *Metodologi Penelitian Sosial untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Bogor: In Media.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 Ayat 1.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-undang RI No.20 tahun 2003.tentang sistem pendidikan nasional.

UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indones Nomor. 36AD;144:36. 2009

Wiratna. (2019). *Metedologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press